

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-2329/PJ/PJ.01/2022
TENTANG PENOMORAN NASKAH DINAS
YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI
BENTUK KHUSUS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. POLA PENOMORAN NASKAH DINAS YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI BENTUK KHUSUS DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon I

X-.../Y/PJ/...



2. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon II

X-.../Y/PJ.AA/...



3. Naskah Dinas Tenaga Pengkaji

X-.../Y/PJ.TP.A/...



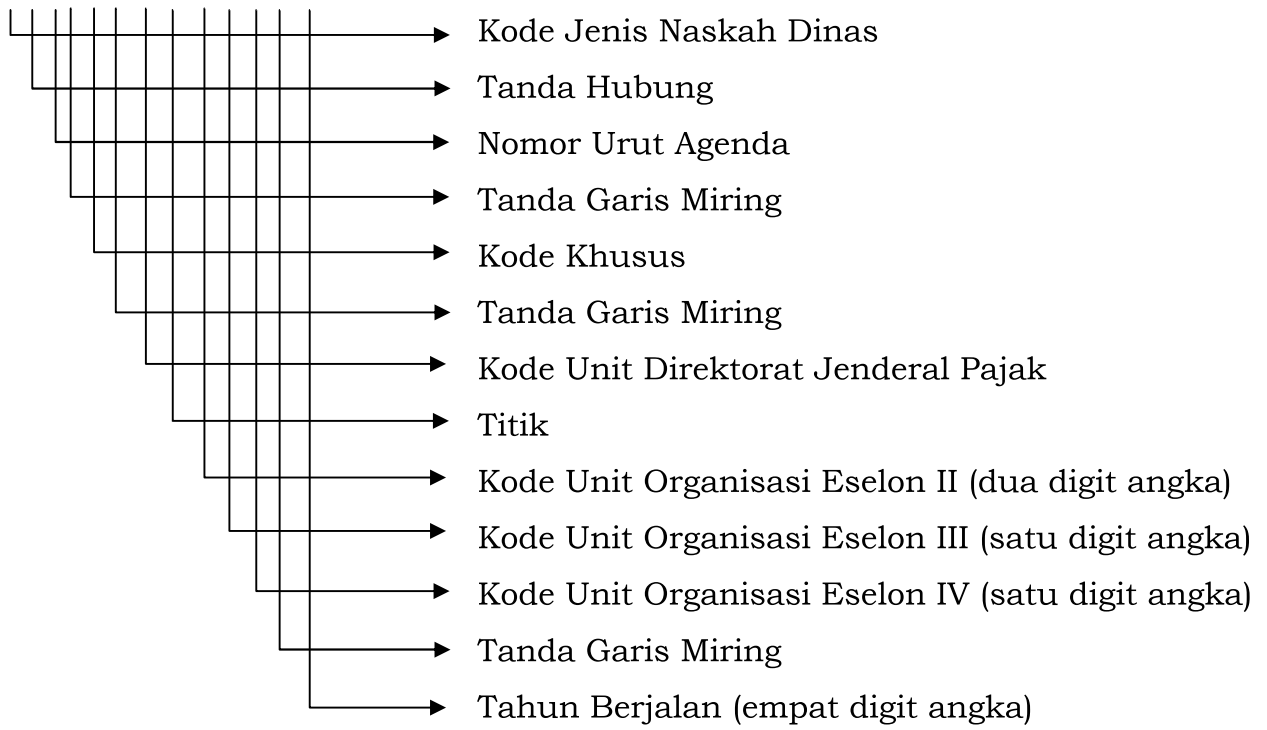
4. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon III

X-.../Y/PJ.AAB/...



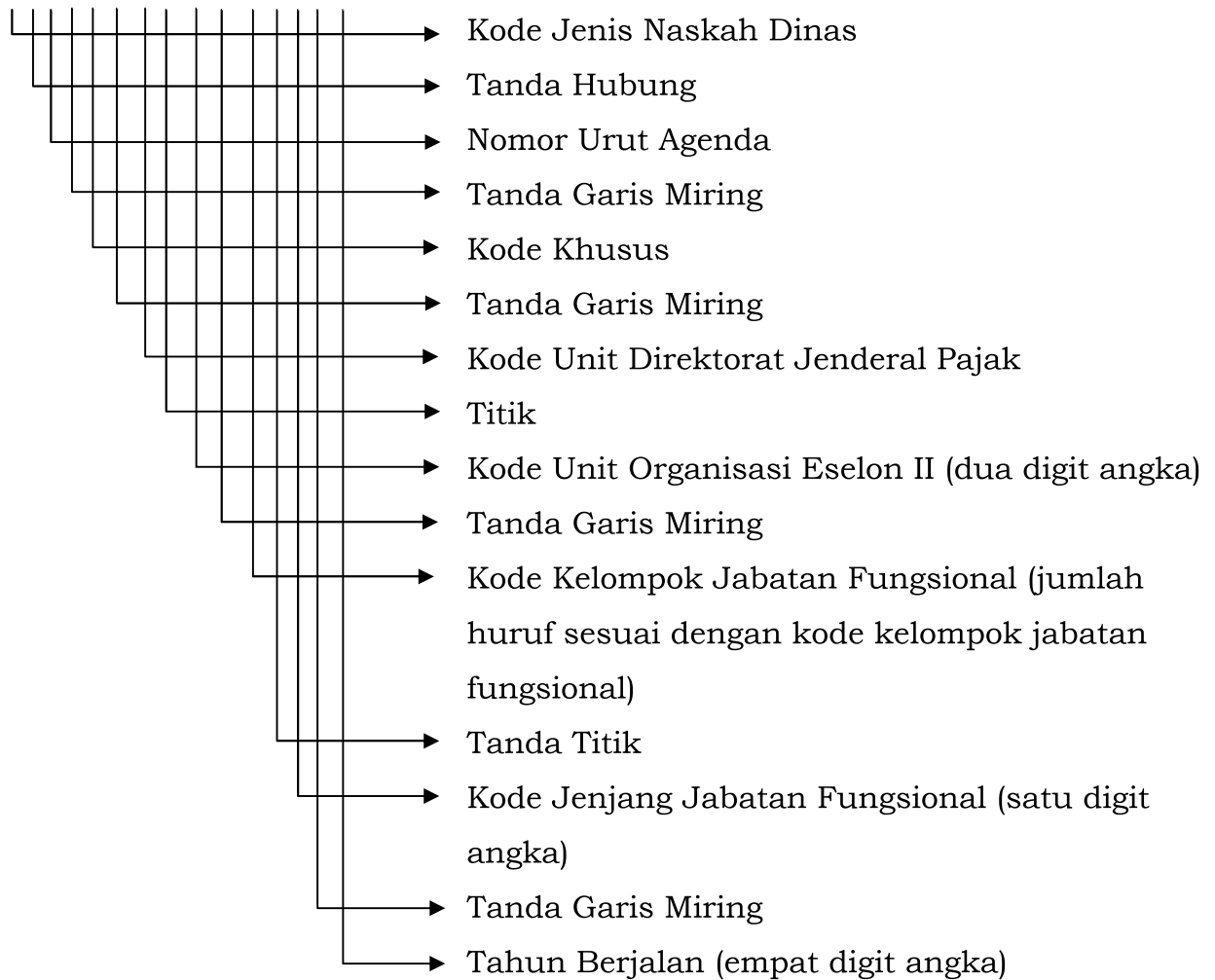
5. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon IV

X-.../Y/PJ.AABC/...



6. Naskah Dinas Jabatan Fungsional

X-.../Y/PJ.AA/ZZ.Z/...



B. POLA PENOMORAN NASKAH DINAS YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI BENTUK KHUSUS DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

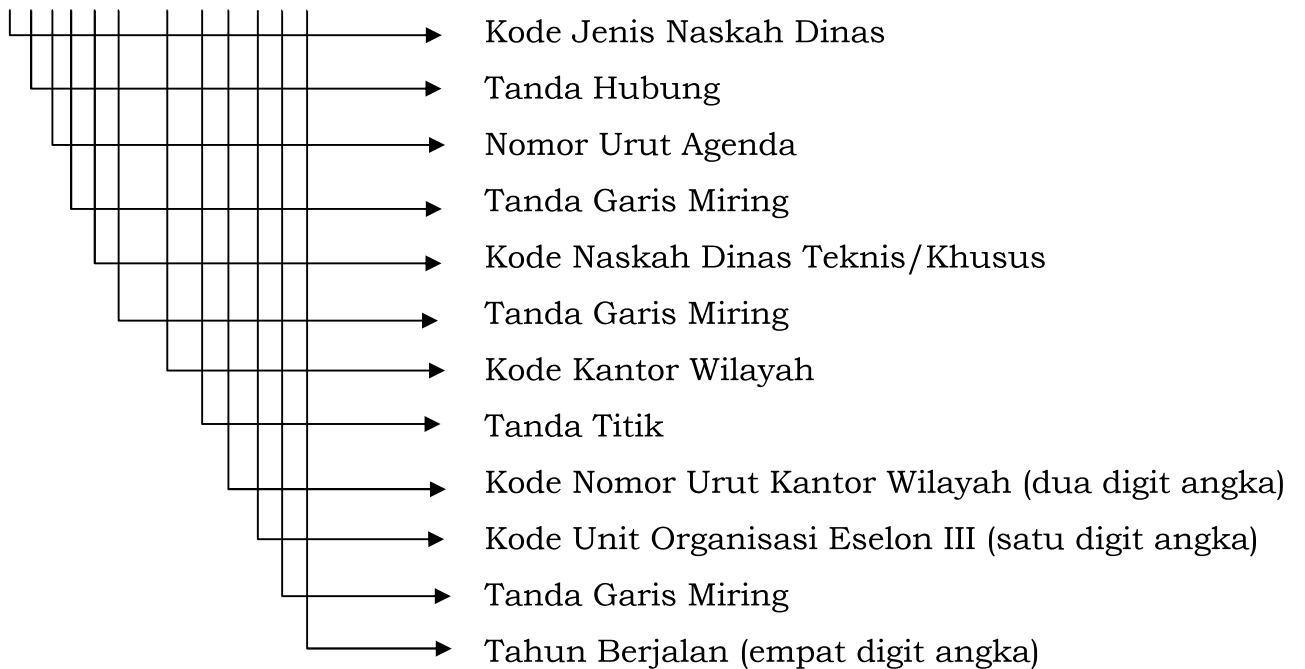
1. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon II

X-.../Y/WPJ.AA/...



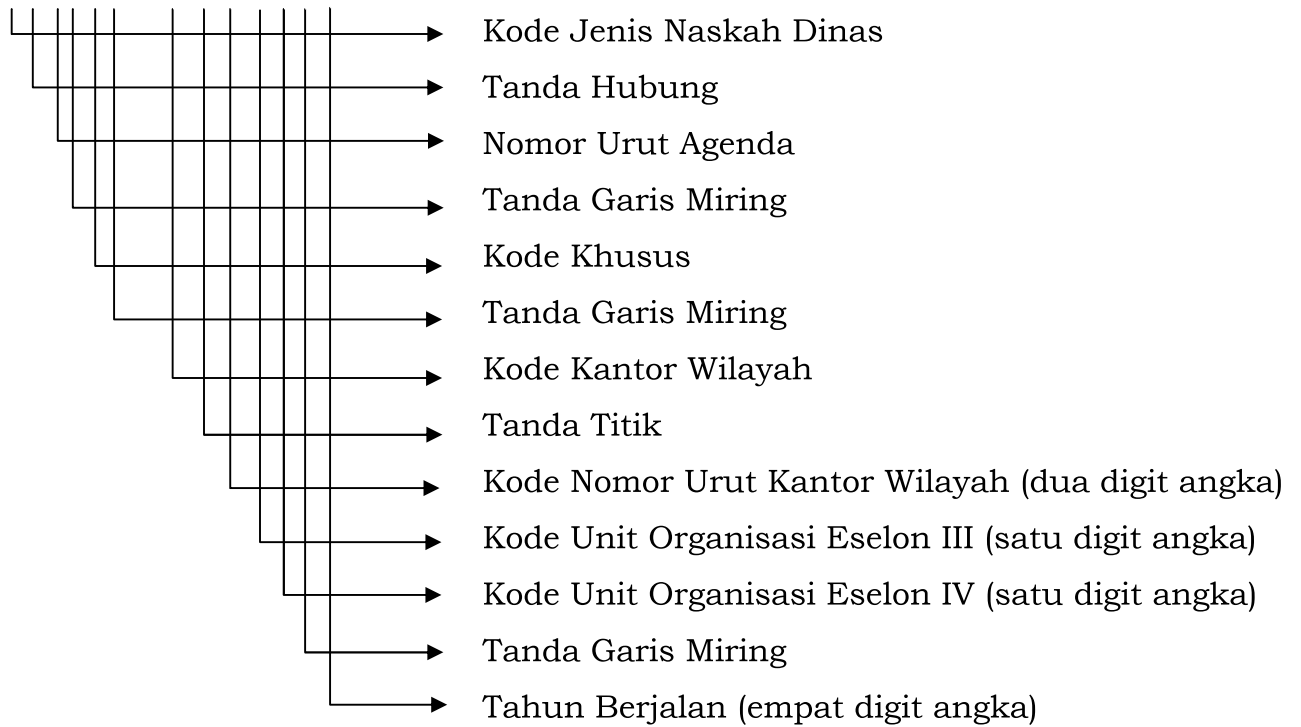
2. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon III

X-.../Y/WPJ.AAB/...



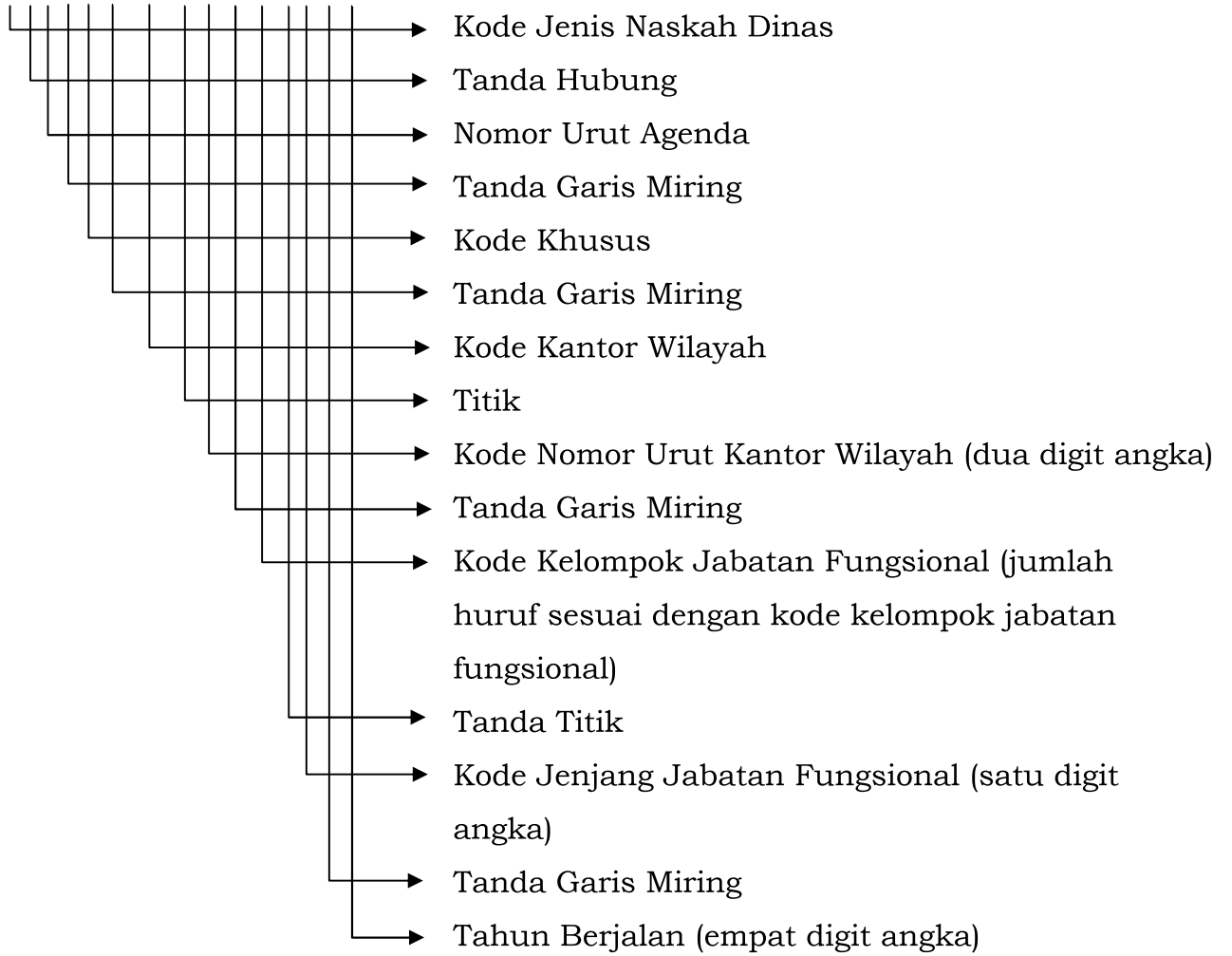
3. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon IV

X-.../Y/WPJ.AABC/...



4. Naskah Dinas Jabatan Fungsional

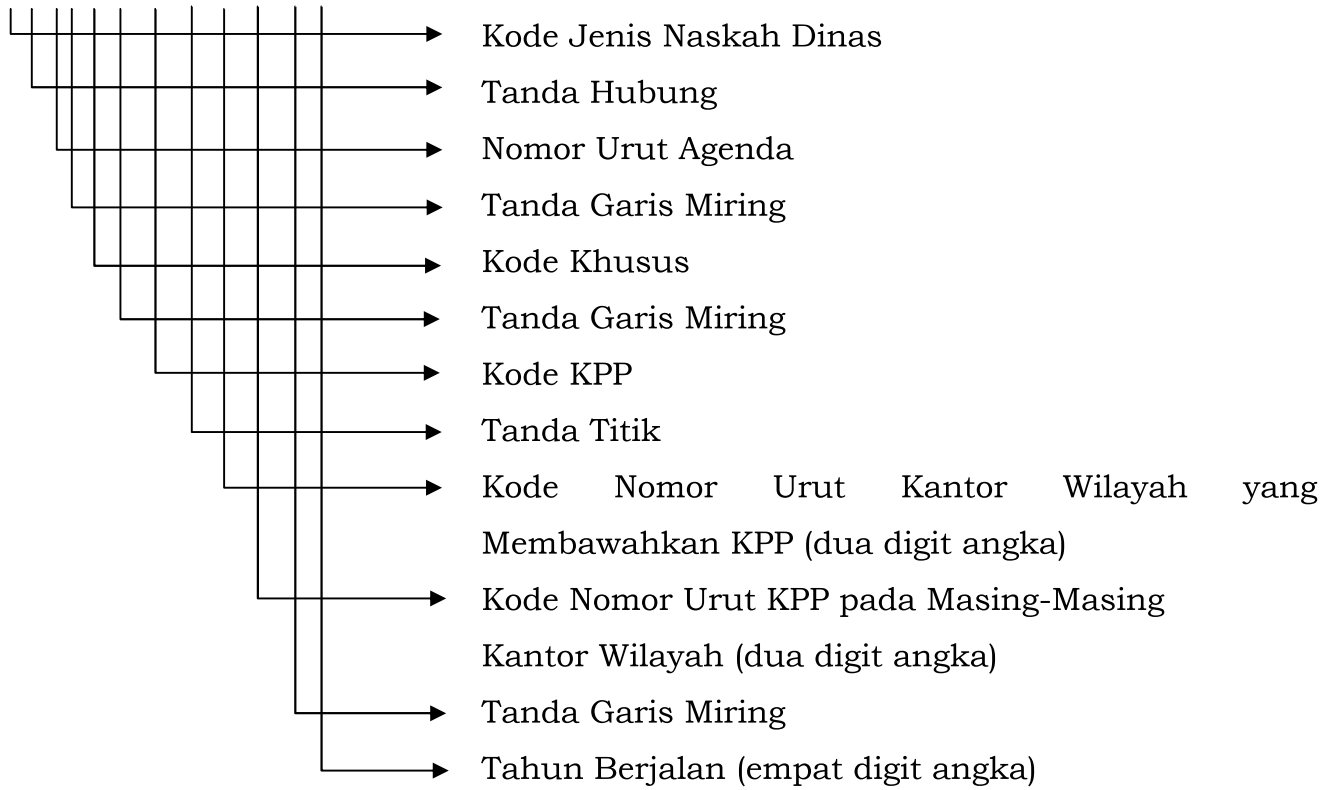
X-.../Y/WPJ.AA/ZZ.Z/...



C. POLA PENOMORAN NASKAH DINAS YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI BENTUK KHUSUS DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

1. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon III

X-.../Y/KPP.AABB/...



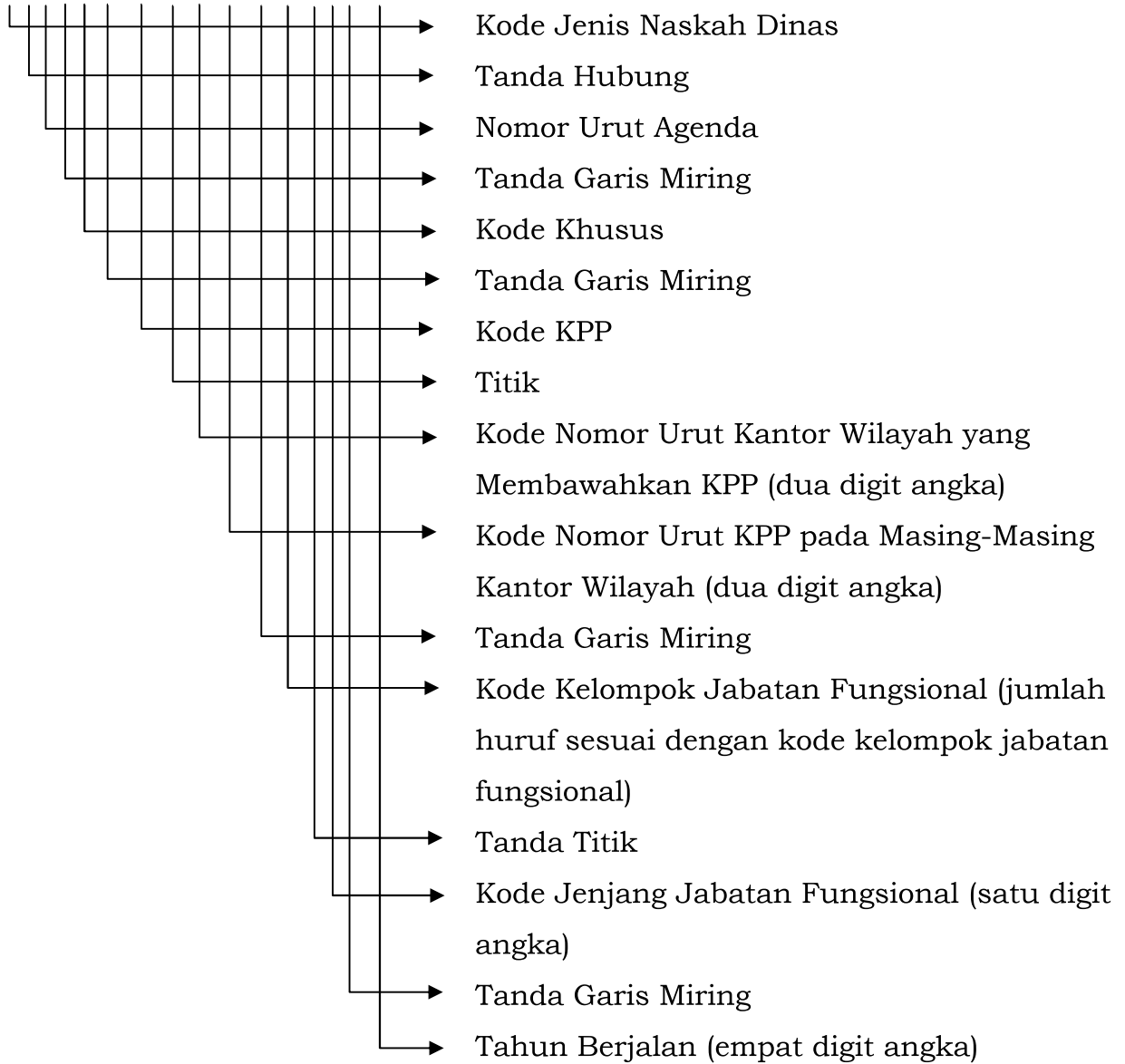
2. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon IV

X-.../Y/KPP.AABBCC/...



5. Naskah Dinas Jabatan Fungsional

X-.../Y/KPP.AABB/ZZ.Z/...



D. POLA PENOMORAN NASKAH DINAS YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI BENTUK KHUSUS DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP)

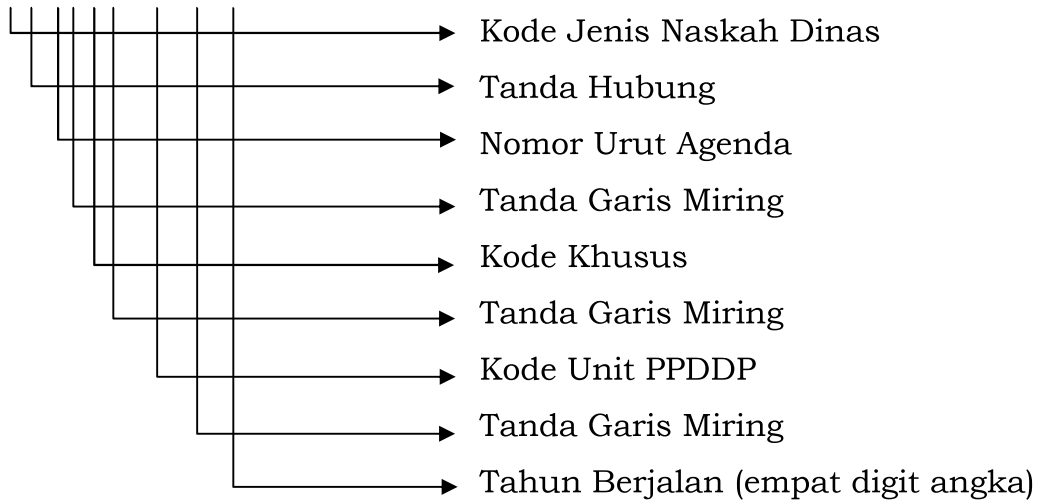
X-.../Y/KKP.AACC/...



E. POLA PENOMORAN NASKAH DINAS YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI BENTUK KHUSUS DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

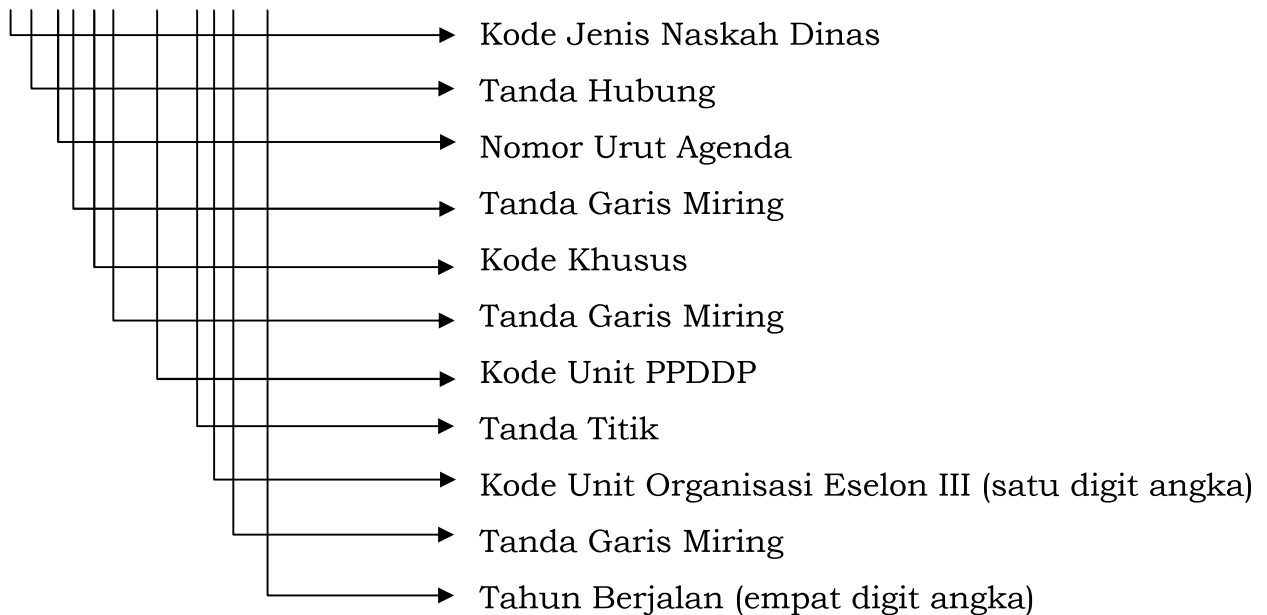
1. Naskah Dinas Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)

X-.../Y/DDP/...



2. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon III pada PPDDP

X-.../Y/DDP.B/...



3. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon IV pada PPDDP

X-.../Y/DDP.BC/...



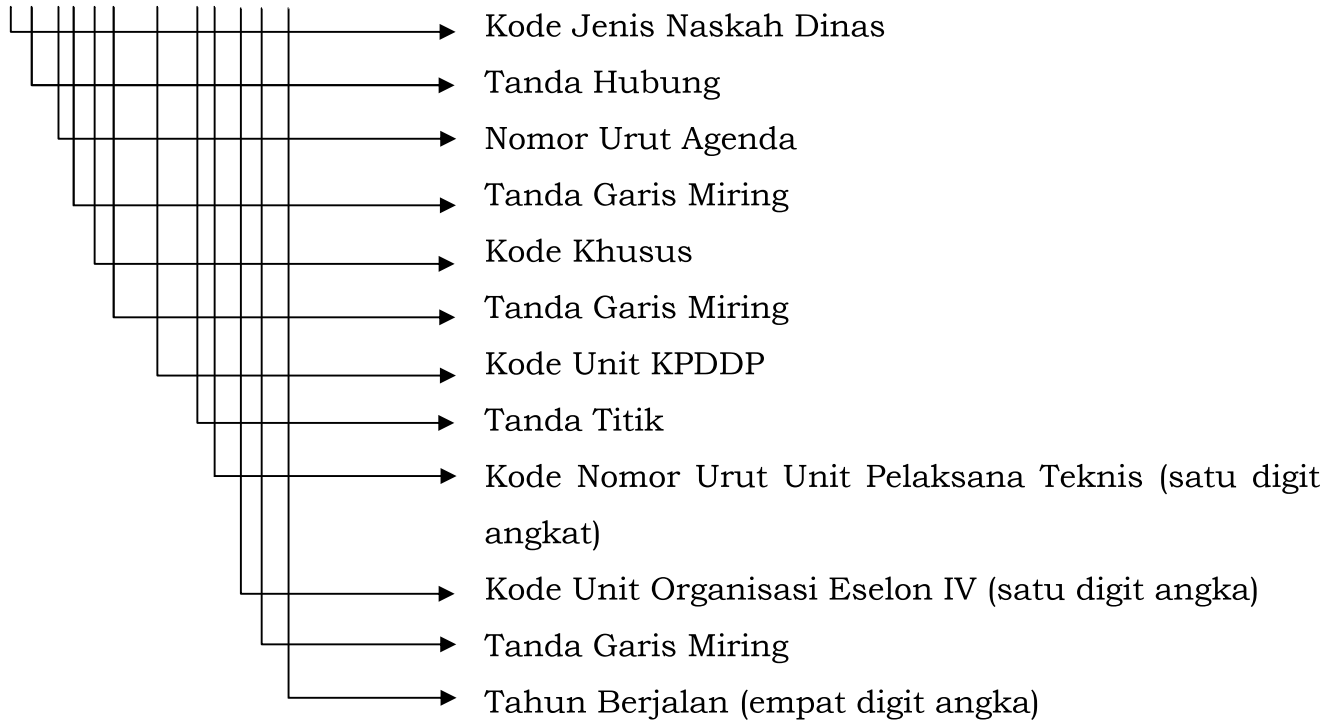
4. Naskah Dinas Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP)

X-.../Y/KPD.B/...



5. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon IV pada KPDDP

X-.../Y/KPD.BC/...



6. Naskah Dinas Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP)

X-.../Y/LIP/...



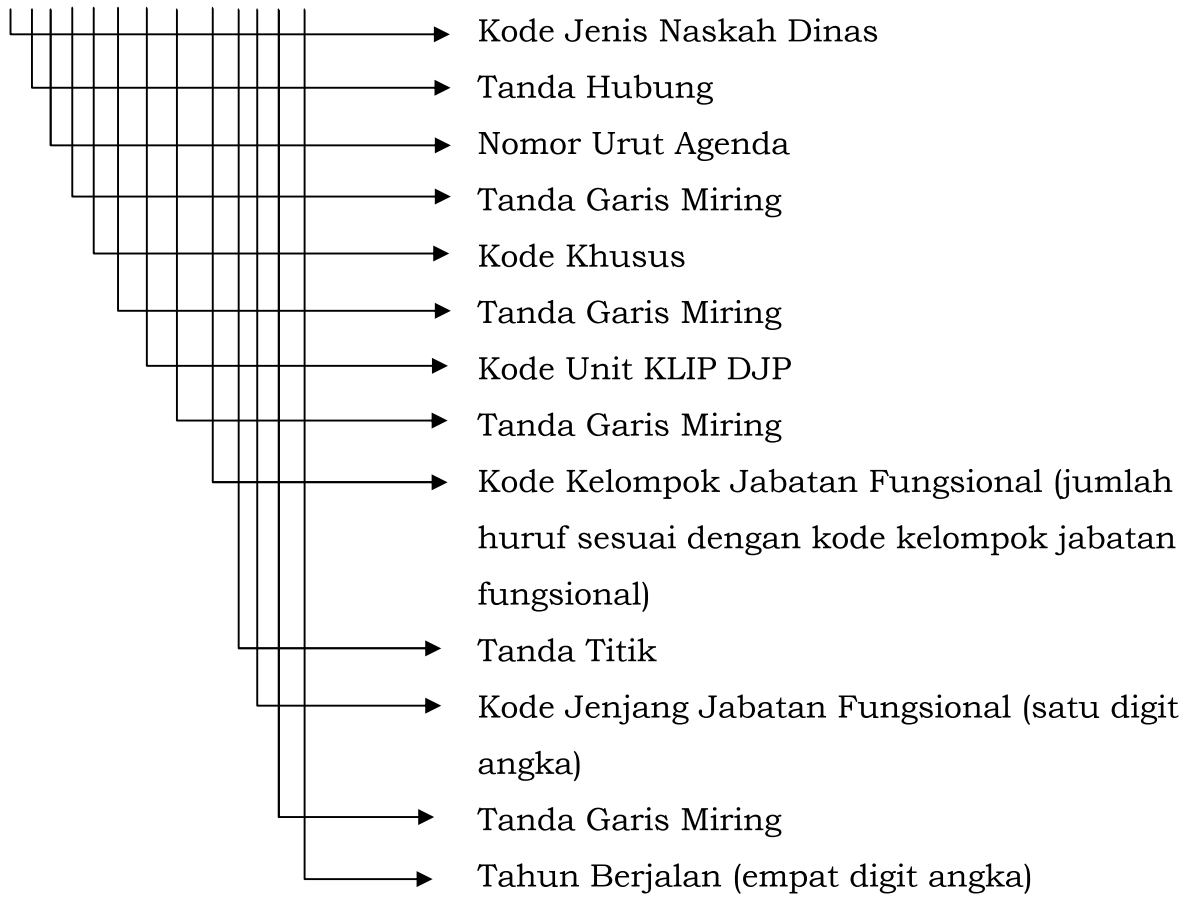
7. Naskah Dinas Unit Organisasi Eselon IV pada KLIP DJP

X-.../Y/LIP.C/...



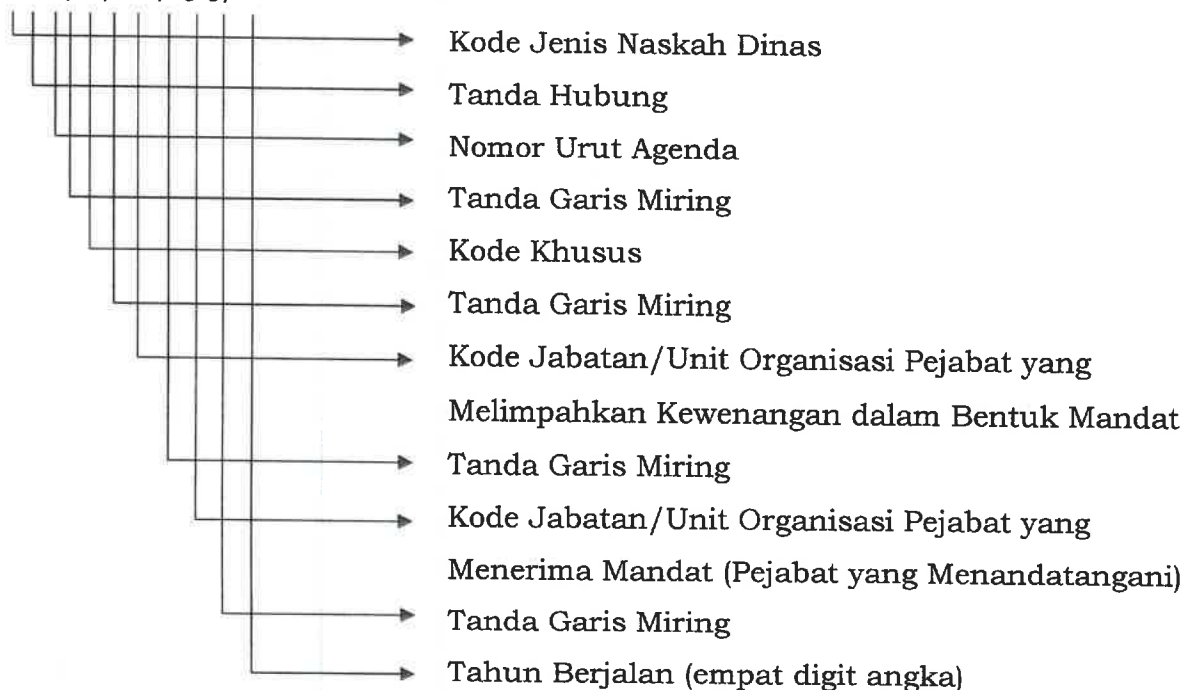
8. Naskah Dinas Jabatan Fungsional pada KLIP DJP

X-.../Y/LIP/ZZ.Z/...



F. POLA PENOMORAN NASKAH DINAS YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI BENTUK KHUSUS DALAM RANGKA PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM BENTUK MANDAT

X-.../Y/PP/QQ/...



a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd.

PENI HIRJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM,



DWI BUDI ISWAHYU
NIP. 19701102 199012 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-2329/PJ/PJ.01/2022
TENTANG PENOMORAN NASKAH DINAS
YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI
BENTUK KHUSUS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. KODE JENIS NASKAH DINAS YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI BENTUK KHUSUS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

No.	Jenis Naskah Dinas	Kode
1.	Keputusan	KEP
2.	Surat Perintah	PRIN
3.	Surat Perintah Perubahan	PRIN-P
4.	Surat Tugas	ST
5.	Nota Dinas	ND
6.	Surat Dinas	S
7.	Berita Acara	BA
8.	Surat Keterangan	KET
9.	Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)	KET-TDPPN
10.	Surat Keterangan Pembatalan SKTD	KET-BTL
11.	Laporan	LAP
12.	Surat Pernyataan	PYT
13.	Ketetapan	TAP
14.	Kertas Kerja	KK
15.	Formulir	FORM
16.	Materi	MT
17.	Lembar	LB
18.	Dokumen	DOK
19.	Pengantar Laporan	PL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

B. KODE KHUSUS PADA NASKAH DINAS YANG BERSIFAT TEKNIS DAN MEMILIKI BENTUK KHUSUS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

No.	Jenis Naskah Dinas	Judul/Perihal Naskah Dinas	Kode Khusus
(1)	(2)	(3)	(4)
BIDANG PENGAWASAN			
1.	Surat Dinas (S)	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	P2DK
		Surat Teguran Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)	TGRSPT
		Surat Imbauan	IMB
		Surat Teguran dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak	TGRWAS
		Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	P3P2DK
2.	Berita Acara (BA)	- Berita Acara Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) untuk Ditetapkan menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) - Berita Acara Pemutakhiran DPP (Triwulanan)	DPPTW
		Berita Acara Penetapan/Pemutakhiran Daftar Sasaran Prioritas Pengawasan (<i>Mandatory</i>)	DPPMD
		Berita Acara Perubahan	BAP
		Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	P2DK
3.	Laporan (LAP)	Laporan Hasil Penelitian	LHPT
		Laporan Hasil Analisis terkait Pengawasan Wajib Pajak	LHAWAS
		Laporan Analisis Strategi Perpajakan: Tingkat Sederhana	APSS
		Laporan Analisis Strategi Perpajakan: Tingkat Menengah	APSM
		Laporan Analisis Strategi Perpajakan: Tingkat Tinggi	APST
		Laporan Analisis Dampak Perpajakan: Tingkat Sederhana	APDS
		Laporan Analisis Dampak Perpajakan: Tingkat Menengah	APDM
		Laporan Analisis Dampak Perpajakan: Tingkat Tinggi	APDT
		Laporan Analisis Kerja Sama Perpajakan: Tingkat Sederhana	APKS
		Laporan Analisis Kerja Sama Perpajakan: Tingkat Menengah	APKM
		Laporan Analisis Kerja Sama Perpajakan: Tingkat Tinggi	APKT

(1)	(2)	(3)	(4)
		Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	P2DK
		Laporan Hasil Kunjungan	LHK
BIDANG PEMERIKSAAN			
1.	Surat Perintah (PRIN)	Surat Perintah Pemeriksaan	RIKSIS
2.	Surat Perintah Perubahan (PRIN-P)	Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan/Ralat Surat Perintah	RIKSIS
3.	Nota Dinas (ND)	<ul style="list-style-type: none"> - Penugasan Pemeriksaan Rutin - Daftar Wajib Pajak yang Disetujui Untuk Diperiksa - Penolakan Pemeriksaan Rutin - Daftar Nominatif yang Disetujui untuk Diperiksa Tujuan Lain - Pemberitahuan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa Data Konkret kepada Kanwil DJP - Usulan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Analisis Risiko Satu atau Beberapa Jenis Pajak - Usulan Pembatalan Penugasan Pemeriksaan - Usulan Pembatalan Penugasan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain - Surat Persetujuan/Penolakan Pembatalan Penugasan Pemeriksaan - Usulan Pengalihan Penugasan Pemeriksaan - Surat Persetujuan/Penolakan Pengalihan Penugasan Pemeriksaan - Permohonan Pembatalan Pemeriksaan Lokasi oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) Lokasi kepada Kanwil DJP - Persetujuan Pembatalan Pemeriksaan Lokasi oleh Kanwil DJP - Instruksi/Persetujuan untuk Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Analisis Risiko Satu atau Beberapa Jenis Pajak - Instruksi untuk Melakukan Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak Berdasarkan DSPP - Penunjukkan Supervisor/Penyusunan Rencana Pemeriksaan - Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian 	RIKSIS
		- Surat Pengantar Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan	IBK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-4-

(1)	(2)	(3)	(4)
		- Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan	
4.	Surat Dinas (S)	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara Jabatan - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP - Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan - Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan - Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II - Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian 	RIKSIS
		Surat Permintaan Informasi kepada Wajib Pajak	IBK
		Tanda Terima Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan	IBKM
		Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara	TOPN
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Panggilan dalam rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan - Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 	PANG
5.	Berita Acara (BA)	Berita Acara Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat	KPPTP
6.	Laporan (LAP)	Laporan Kemajuan Pemeriksaan Yang Ditangguhkan	LAPJU
		Laporan Hasil Pemeriksaan	RIKSIS
		Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara	TOPN
7.	Dokumen (DOK)	Naskah Serah Terima Pemeriksaan	NST
BIDANG PENAGIHAN			
1.	Keputusan (KEP)	Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak	ANGSUR
		Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak	TUNDA
		Keputusan Pembetulan dalam rangka Penagihan Pajak	TUL
		Keputusan Pembatalan dalam rangka Penagihan Pajak	BAT
		Keputusan Ganti Rugi	SDR

(1)	(2)	(3)	(4)
		Keputusan Penggantian	PNG
2.	Surat Perintah (PRIN)	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	SPMP
		Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus	PSS
		Surat Perintah Penyanderaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	SDR
		Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan sehubungan dengan Utang Pajak Bumi dan Bangunan	SPMPPB B
		Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Sehubungan Permintaan Bantuan Penagihan Pajak dari KPP di Luar Wilayah Kerja	SPMPB
3.	Nota Dinas (ND)	<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan Pencegahan/Pelaksanaan Gelar Perkara Pencegahan - Permintaan Perpanjangan Masa Pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa - Permintaan Pencabutan Pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 	CGH
		Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang	LELANG
		<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan Pelaksanaan Gelar Perkara Penyanderaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa - Permohonan Izin Melakukan Penyanderaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa - Permohonan Izin Perpanjangan Penyanderaan Penanggung Pajak - Permohonan Rekomendasi Pelepasan Sandera dengan Pertimbangan Tertentu Menteri Keuangan 	SDR
4.	Surat Dinas (S)	Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak/Bukan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Sektor Perbankan	BLOKIR
		Surat Permintaan Pencabutan Blokir pada LJK Sektor Perbankan	CABUT
		Surat Permintaan Pencabutan Blokir dan Pindahbukuan Harta Kekayaan yang Tersimpan pada LJK Sektor Perbankan	CBTPBK
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan Info Rekening dan Saldo yang Tersimpan pada LJK Sektor Perbankan - Surat Permintaan Rincian Transaksi Rekening yang Tersimpan pada LJK Sektor Perbankan 	REK

(1)	(2)	(3)	(4)
		Surat Paksa	SP
		Surat Teguran dalam rangka Penagihan	TGRPNG
		Surat Tagihan Biaya Penagihan	TBP
		Surat Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Sehubungan Kegiatan Pemblokiran Harta Kekayaan di LJK - Khusus LJK Perbankan	IBKPNG
		- Surat Izin Kunjungan Penanggung Pajak yang Disandera - Surat Izin Keluar Sementara	SDR
		Surat Paksa yang Diterbitkan sehubungan dengan Pelaksanaan Penagihan Seketika Sekaligus Sebelum Surat Teguran Terbit	SPPSS
		Surat Paksa yang Diterbitkan sehubungan dengan Utang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	SPPBB
		Surat Teguran yang Diterbitkan sehubungan dengan Utang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	STPBB
5.	Berita Acara (BA)	Berita Acara Pelaksanaan Sita	SITA
		Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	SP
		Berita Acara Tidak Ditemukan Objek Sita	SITATD
		Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang kepada Pejabat	HAK
		Berita Acara Pengembalian Barang Sitaan	SITART
		Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan yang Penjualannya Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang selain Pemindahbukuan Harta Kekayaan yang Tersimpan pada LJK dan/atau Entitas Lain	PJBS
		Berita Acara Hilang, Rusak, atau Tidak Ditemukannya Surat Terkait Penagihan Pajak	TGH
		Berita Acara Penelitian Usulan Penghapusan Piutang Pajak	HPP
		- Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa - Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa - Berita Acara Penempatan/Penitipan Sandera dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa - Berita Acara Gelar Perkara Penyanderaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	SDR

(1)	(2)	(3)	(4)
		Berita Acara Gelar Perkara Pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	CGH
6.	Surat Keterangan (KET)	- Surat Keterangan Penanggung Pajak - Surat Keterangan Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang Menjadi Tanggung Jawab Penanggung Pajak	TGH
7.	Laporan (LAP)	Laporan Pelaksanaan Surat Paksa	SP
		Laporan Hasil Penelitian Administrasi	ADM
		Laporan Hasil Penelitian Setempat	TPT
		Laporan Hasil Penelusuran Aset	ASETPN G
8.	Lembar (LB)	Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengangsuran	ANGSUR
		Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Penundaan	TUNDA
9.	Dokumen (DOK)	Daftar Sasaran Kegiatan Penagihan Bersama <i>Joint Collection</i>	DSKPB
		Daftar Usulan Penghapusan Piutang	DUPP
		Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal (Akta Bawah Tangan)	PHPM
		Tanda Terima Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan dari LJK Sektor Perbankan, LJK Sektor Perasuransian, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain atau LJK Sektor Pasar Modal dalam rangka Penagihan Pajak	IBKPNG
		Tanda Terima Penyerahan Barang Sitaan ke Pemenang Lelang	LELANG
BIDANG KEBERATAN DAN BANDING			
1.	Keputusan (KEP)	Keputusan Keberatan atas: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); - Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan; dan - pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 	KEB
		Keputusan (Nonkeberatan) mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, dan surat 	NKEB

(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; - pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; - pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar; - pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; - pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; - pengurangan atau pembatalan SPPT yang tidak benar; dan - pembatalan basil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir basil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 	
2.	Surat Tugas (ST)	Surat Tugas Peninjauan Lapangan dalam rangka Penelitian Keberatan	PL
3.	Surat Dinas (S)	<p>Surat Pemberitahuan untuk Hadir</p> <p>Surat Uraian Banding</p> <p>Surat Tanggapan</p> <p>Surat Pelaksanaan Putusan Banding</p> <p>Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan</p> <p>Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali</p> <p>Penjelasan Tertulis terkait Sengketa</p>	<p>SPUH</p> <p>SUB</p> <p>STG</p> <p>SP2B</p> <p>SP2G</p> <p>SP2PK</p> <p>PT</p>
4.	Laporan (LAP)	<p>Laporan Hasil Evaluasi Putusan Pengadilan Pajak/Mahkamah Agung</p> <p>Laporan Sidang</p> <p>Laporan Sidang Aplikasi</p> <p>Laporan Sidang Manual</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi Penelaahan Sejawat (<i>Peer Review</i>) per Keputusan</p> <p>Laporan Hasil Peninjauan Lapangan dalam rangka Penelitian Keberatan/ Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Laporan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak</p>	<p>LHE</p> <p>LS</p> <p>LSA</p> <p>LSM</p> <p>PEER</p> <p>PL</p> <p>LP2PP</p>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-9-

(1)	(2)	(3)	(4)
		Laporan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali	LP2PK
5.	Dokumen (DOK)	Matriks Sengketa Keberatan	MTK
BIDANG INTELIJEN			
1.	Keputusan (KEP)	Rencana Kegiatan Intelijen Perpajakan	RKIP
2.	Surat Perintah (PRIN)	Surat Perintah Kegiatan Intelijen Perpajakan	KIP
3.	Surat Dinas (S)	Surat Permintaan Tambahan Data/Informasi dalam rangka Kegiatan Intelijen Perpajakan	PTDI
4.	Surat Keterangan (KET)	Surat Keterangan Pemberian Perintah Lisan Kegiatan Intelijen Perpajakan	KIP
5.	Laporan (LAP)	Laporan Atensi	IPAT
		Laporan Hasil Intelijen Perpajakan	LHIP
		Laporan Pelaksanaan Tugas	LPT
		Laporan Informasi Intelijen Perpajakan	IPI
6.	Kertas Kerja (KK)	Kertas Kerja Informasi	IPI
7.	Formulir (FORM)	Formulir Penerimaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan	IDLP
		Form Pemanfaatan Data	PMD
		Bukti Penerimaan Surat (BPS) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan	BPSIDL
		Lembar Identifikasi Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan	LIDI
8.	Lembar (LB)	Lembar Informasi Intelijen Perpajakan	IPI
		Lembar Ralat	IPRAL
		Lembar Penelaahan Pemberitahuan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi <i>Suspend</i>	IPSUS
		Lembar Penelitian Indikasi Penerbit	LPIP
BIDANG EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN			
1.	Keputusan (KEP)	Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun Daftar Sasaran Prioritas Penilaian	DSPPN
		Keputusan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Bumi dan Bangunan	PBB
2.	Surat Perintah (PRIN)	Surat Perintah Penilaian	PEN
3.	Surat Tugas (ST)	Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan	PENRIK
4.	Surat Dinas (S)	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Ekstensifikasi	P2DKE
		Surat Penolakan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan	PHTBBTL

(1)	(2)	(3)	(4)
		Surat Teguran Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak	TGRPBB
		Surat Pemberitahuan Belum Memenuhi Persyaratan untuk Diberikan Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang	PPN
5.	Berita Acara (BA)	Berita Acara Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Melewati Batas Waktu	DFTPBB
		Berita Acara Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak Bumi dan Bangunan Melewati Batas Waktu	CBTPBB
6.	Surat Keterangan (KET)	Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan	PHTB
		Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan	PHTBBTL
		Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan	PBB
7.	Laporan (LAP)	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Ekstensifikasi	P2DKE
		Laporan Hasil Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan	PHTB
		- Laporan Penilaian	PEN
		- Laporan Pelaksanaan Tugas	
		- Laporan Penelitian Material SPOP	PBB
		- Laporan Hasil Pendataan Lapangan	
		Laporan Hasil Pemetaan	PETA
BIDANG PENEGAKAN HUKUM			
1.	Keputusan (KEP)	Rencana Strategi Perolehan Data Elektronik	PDE
		Rencana Strategi Pengolahan dan Analisis Data Elektronik	PADE
2.	Surat Perintah (PRIN)	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Terbuka/Tertutup	BP
		Surat Perintah Penggeledahan	DAH
		Surat Perintah Penyidikan	DIK
		Surat Perintah Penyidikan Tambahan untuk Penetapan Tersangka/Tambahan Lainnya	DIK
		Surat Perintah Penyitaan	SITA
		Surat Perintah Penghentian Penyidikan	SPPP
		Surat Perintah Penugasan	GAS
		Surat Perintah Forensik Digital	FD

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Surat Perintah Perubahan (PRIN-P)	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan (Terbuka/Tertutup)	BP
4.	Surat Tugas (ST)	Surat Tugas Forensik Digital	FD
5.	Nota Dinas (ND)	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Terbuka ke KPP	PEMBP
		Nota Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan	BP
		Nota Dinas PPNS terkait Kegiatan Penyidikan ke Kepala Subdirektorat Penyidikan	DIK
		Pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP) Perubahan ke KPP	PBP.P
		Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan ke KPP	PBPAT
6.	Surat Dinas (S)	Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan	DAH
		Surat Panggilan terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan	PANGBP
		Surat Panggilan terkait Penyidikan	PANGDIK
		Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara Terbuka ke Wajib Pajak	PEMBP
		Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan	SITA
		Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	SPDP
		Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Orang Pribadi/Korporasi	TAP
		Surat Permintaan Informasi dan/atau Bukti Atau Keterangan Terkait Akses Informasi Keuangan	IBK
		Surat kepada Pihak Ketiga mengenai Permintaan Secara Tertulis Keterangan dan/atau Bukti	PKB
		Pemberitahuan SPPBP Perubahan ke Wajib Pajak	PBP.P
		Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Wajib Pajak	PBPAT
		Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan	HPBP
7.	Berita Acara (BA)	Berita Acara Pembatalan SPPBP/SPPBP Perubahan	BATAL
		Berita Acara Gelar Perkara Penelaahan	LAR
		Berita Acara Perolehan Data Elektronik	PDE

(1)	(2)	(3)	(4)
		Berita Acara Penelaahan Usul Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan	PENBP
		Berita Acara Penetapan Tersangka	TAP
		Berita Acara Penelaahan Perolehan Data Elektronik	TPDE
		Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	USULBP
		Berita Acara Penyimpanan Benda Sitaan	SIMBS
		Berita Acara Bantuan Pengelolaan Benda Sitaan	BANBS
		Berita Acara Penitipan Benda Sitaan	TIPBS
		Berita Acara Penggunaan Benda Sitaan	GUNBS
		Berita Acara Pengembalian atas Penggunaan Benda Sitaan	BALBS
		Berita Acara Pengembalian Pengelolaan Benda Sitaan	LIPBS
		Berita Acara Pengembalian atas Penitipan Benda Sitaan	AMBBS
		Berita Acara Pengambilan Benda Sitaan	BILBS
		Berita Acara Pengeluaran Benda Sitaan	KELBS
		Berita Acara Penelaahan Usul Penyidikan Tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan	PENDIK
8.	Laporan (LAP)	Laporan Pengembangan	DEV
		Berkas Perkara Penyidikan	DIK
		Laporan Hasil Pemantauan Sidang	LHPS
		Laporan Kejadian	LK
		Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan	LPBP
		Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan	JUSDK
		Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital	TFD
		Laporan Kejadian Benda Sitaan	LKBS
		Laporan Pengelolaan Benda Sitaan	LAPBS
		Laporan Progres Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan	PBPPR
		Laporan Forensik Digital	FD
9.	Ketetapan (TAP)	Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	SKPP
10.	Kertas Kerja (KK)	Kertas Kerja Analisis Identifikasi Data Elektronik	AIDE
		Kertas Kerja Pengolahan Data Elektronik	PDE
		Kertas Kerja Analisis Data Elektronik	GKDE
11.	Formulir (FORM)	Formulir <i>Chain of Custody</i> Data Elektronik	COCDE
		Formulir <i>Chain of Custody</i> Perangkat Elektronik	COCPE

(1)	(2)	(3)	(4)
		Formulir Identifikasi Kebutuhan Data Elektronik	IKDE
		Formulir Identifikasi Penanganan Awal	IPA
		Formulir Identifikasi Perangkat Elektronik	IPE
		Formulir Kuesioner Sistem Informasi	KSI
12.	Lembar (LB)	Lembar Persiapan Perolehan Data Elektronik	GKDE
		Lembar Pengamatan Lokasi Perangkat	ALP
		Lembar Dokumentasi Foto dan/atau Video	CAM
		Lembar Daftar Dokumen Forensik Digital	FD
13.	Dokumen (DOK)	Ikhtisar Perolehan Data Elektronik	PDE
		Ikhtisar Pengolahan dan Analisis Data Elektronik	PADE
BIDANG PENYULUHAN DAN PELAYANAN			
1.	Keputusan (KEP)	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	SKPPKP
		Persetujuan Permohonan Perubahan Tahun Buku	THBK
		Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan	PPh
		Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai	PPN
		Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Lainnya	LAIN
		Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Dapat Diberikan Pembayaran Pajak	KTRR
		Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang	PPPN
		Keputusan Penetapan Wajib Pajak Carbon	CBN
2.	Surat Perintah (PRIN)	Surat Perintah Edukasi	SPE
3.	Nota Dinas (ND)	Penelitian Wajib Pajak Non-Efektif	NE
		Pencabutan NPWP	CBT
		Klarifikasi Cabut PKP	KCP
		Klarifikasi <i>Suspend</i>	KSS
		Penghapusan NPWP	HPS
4.	Surat Dinas (S)	Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa	SPTMPK
		Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT	SPTS
		Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan	SPTTPK
		Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan	SPTSP

(1)	(2)	(3)	(4)
		Surat Persetujuan/Penolakan Izin Riset	RISET
		Surat Penolakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	SKPPKP
		Surat Penolakan atas Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Wajib Pajak Real Estate	TANAH
		Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	ETOP
		Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	ETB
		Surat Penolakan atas Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Emas Batangan 2011	IMPMAS
		Surat Penolakan atas Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI	BUNGA
		Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai	MTM
		Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Sistem Komputerisasi	SK
		Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan	TP
		Surat Penolakan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai	BM
		Penolakan Permohonan Pemindahbukuan	PBK
		Surat Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku	THBK
		Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah	KTRR
		Surat Keterangan Terdaftar	KT
		Surat Pengukuhan PKP	PKP
		Surat Penghapusan NPWP	HPS
		Surat Pencabutan NPWP	CBT
		Surat Perubahan Data	PD
		Surat Pengiriman Dokumen Manual	SPD
		Surat Pemberitahuan	BTL
		Surat Aktivasi Wajib Pajak Non-Efektif	NE
		Surat Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif	PNE
		Surat Penolakan Klarifikasi Cabut PKP	PKC

(1)	(2)	(3)	(4)
		Surat Pindah	PDH
		Surat Cabut Surat Keterangan Terdaftar	SKC
		Surat Aktivasi E-FIN	EFIN
		Surat Konfirmasi Dokumen	KFM
		Surat Pemberitahuan Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Belum Memenuhi Persyaratan	PPN
		Surat Pencabutan Wajib Pajak Carbon	CBTC
		Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP (PMK-23)	21DTP
		Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP (PMK-3)-KLU	21KLU
		- Surat Penolakan Permohonan SKB Pajak Penghasilan 22 Impor (PMK-23) - Surat Penolakan Permohonan SKB Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PMK- 3)	22IMP
		- Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PMK-23) - Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PMK-3)	25INS
		Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PMK-23)-Kawasan Berikat	25KB
		Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PMK-23)-KITE	25KITE
		- Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PMK-23)- KLU - Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PMK-3)- KLU	25KLU
		Surat Penolakan Permohonan SKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah	PPNBM
		Pembatalan BPS	BPSBTL
		Pemberitahuan Penerbitan BPS SPT Pengganti	BPSG
		Surat Penolakan Atas Pemohonan Izin Pembukuan Bahasa Indonesia Satuan Mata Uang Rupiah	INDRP

(1)	(2)	(3)	(4)
		Surat Pengembalian Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	NPPN
		Pemberitahuan Pemenuhan Pajak Penghasilan Tidak Lengkap/Tidak Sesuai (PER-21)	PHTBTL
		Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan PP-23	PP23
		Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Fiskal	SKF
		Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri	SKJLN
		Surat Keterangan Bagi Pengembang (<i>Developer</i>) yang Mendapat Fasilitas Pengampunan Pajak	WPTA
		Pemberitahuan Pemenuhan Pajak Penghasilan <i>Developer</i> Tidak Lengkap	WPTATL
5.	Berita Acara (BA)	Berita Acara Penyuluhan	BAPTL
		Berita Acara Konsultasi	BAK
		Berita Acara Pembahasan (Kalibrasi)	BAPK
		Berita Acara Perubahan Data	PD
		Berita Acara Pembatalan	BTL
		Berita Acara Aktivasi NPWP	AKT
		Berita Acara Penerbitan Lewat Waktu	LWT
		Berita Acara Sertifikat Elektronik	CRT
		Berita Acara Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Otomatis oleh Sistem	PPN
		Berita Acara Hasil Penelitian Penerbitan Kembali SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP	TK
6.	Surat Keterangan (KET)	Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Wajib Pajak Real Estate	TANAH
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	HIBAH
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Emas Batangan 2011	IMP MAS
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor	IMPOR
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 21/22/23	PPUT
		Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu	PPN
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pembelian Kendaraan Angkutan Umum Dalam Negeri	PPNBM

(1)	(2)	(3)	(4)
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI	IMP MAS
		Penghitungan Lebih Bayar (PLB)	PLB
		Pemindahbukuan (PBK)	PBK
		Surat Pemberitahuan Penetapan Non-Aktif Sertifikat Elektronik	SS
		Surat Pemberitahuan Penetapan Reaktifasi Sertifikat Elektronik	AS
		- Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK-28) - Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK-239) - Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK-226)	22ALK
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan 22 Impor (PMK-23)-Kawasan Berikat	22KB
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan 22 Impor (PMK-23)-KITE	22KITE
		- Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan 22 Impor (PMK-23)-KLU - Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PMK-3)-KLU	22KLU
		- Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK-143)-Produksi Vaksin - Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK-239)-Produksi Vaksin - Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK-226)-Produksi Vaksin	22PVAC
		- Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK-143)-Penjualan Vaksin - Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK-239)-Penjualan Vaksin - Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK-226)-Penjualan Vaksin	22VAC
		- Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 23 (PMK-28) - Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 23 (PMK-239)	23ALK
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah-Impor	BMI
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah-Penyerahan	BMP

(1)	(2)	(3)	(4)
		Surat Keterangan Status Wajib Pajak	KSWP
		Surat Keterangan PP-23	PP23
		Surat Keterangan Fiskal	SKF
		Surat Keterangan Jasa Luar Negeri	SKJLN
7.	Surat Keterangan Tidak Dipungut (KET-TDPPN)	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai - Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Nilai Pengganti untuk Setiap Impor atau Penyerahan - Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Nilai Pengganti - Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai untuk Satu Kali Impor atau Penyerahan 	SKTD
8.	Surat Keterangan Pembatalan SKTD (KET-BTL)	Surat Keterangan Pembatalan SKTD	SKTD
9.	Laporan (LAP)	Laporan Evaluasi	LEP
		Laporan Evaluasi Penyuluhan Langsung Secara Pasif	LEPP
		Laporan Analisis Kebutuhan Penyuluhan atau Laporan Hasil Analisis	LAKP
		Laporan Monitoring	LMP
		Laporan Monitoring Penyuluhan Langsung Secara Pasif	LMPP
		Laporan Picket	LPK
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan atau Laporan Pelaksanaan Pelatihan	EDU
		Laporan Pemantauan Persiapan	LPP
		Laporan Pelaksanaan Pendampingan	LPPK
		Laporan Rencana Kerja	LRK
		Laporan <i>Session Plan</i>	LSP
		Laporan Pelaksanaan Uji Pemeringkatan	LUPK
		Laporan Rencana Kerja Penyuluhan Periodik (<i>Outbound</i>)	RKO
		Laporan Penyusunan Materi	PM
		Laporan Review	RV
		Laporan Inventarisasi Bahan Panduan	IBP
		Laporan Hasil Inventarisasi Pertanyaan Eskalasi Informasi	HIPE
		Laporan Pemantauan Langsung (<i>Live Monitoring</i>) Penjaminan Kualitas Layanan	MON
		Laporan Evaluasi Kinerja Tim Operasional	EKTO
		Laporan Evaluasi Kinerja Seksi Penjaminan Kualitas Layanan	EKPKL

(1)	(2)	(3)	(4)
		Laporan Evaluasi Kinerja Tim Pengaduan	EKTP
		Laporan Penyesuaian Jadwal	PSJ
		Laporan Pengolahan Data Panggilan Keluar (<i>Outbound</i>)	PDPK
		Laporan Hasil Penilaian Periodik	HPP
		Laporan Hasil Eskalasi Periodik	HEP
		Laporan Hasil Analisis Pengaduan Periodik	HAPP
		Laporan penelitian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	SKPPKP
		Laporan Hasil Penelitian Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah	KTRR
10.	Formulir (FORM)	BPS Permohonan Wajib Pajak	BPS
		BPS Permohonan <i>Mobile Tax Unit</i>	BPSMTU
11.	Materi (MT)	Materi Penyuluhan/Pelatihan	MP
		Materi Soal	MPT
		Materi Survei	MS
12.	Lembar (LB)	Lembar Persetujuan Materi	LPS
13.	Dokumen (DOK)	Uraian Penelitian SKTD	SKTD
14.	Pengantar Laporan (PL)	Pengantar Laporan Hasil Inventarisasi Pertanyaan Penjaminan Kualitas Layanan	HIP
		Pengantar Laporan Pemantauan Langsung (<i>Live Monitoring</i>) Operasional	PLO
		Pengantar Laporan Pelaksanaan Piket Interaksi	PPI
		Pengantar Laporan Rekaman Media	RM
		Pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan	PK
		Pengantar Laporan Hasil Analisis Pengaduan	HAP
		Pengantar Laporan Pelaksanaan Asistensi	PA
		Pengantar Laporan Hasil Pelaksanaan Penyampaian Pengetahuan	HP3
		Pengantar Laporan Koordinasi	KO
		Pengantar Laporan Pendampingan	PP
		Pengantar Laporan Hasil Penilaian	HPN
BIDANG PERPAJAKAN INTERNASIONAL			
1.	Nota Dinas (ND)	Nota Dinas (Rahasia) mengenai Pertukaran Informasi ((<i>Exchange of Information (EoI) on Request/ Spontaneous EoI/ Automatic EoI</i>))	EOI
2.	Surat Dinas (S)	Nota Dinas (Rahasia) mengenai Pertukaran Informasi (<i>EoI on Request/ Spontaneous EoI/ Automatic EoI</i>)	EOI
3.	Dokumen (DOK)	Risalah Pembahasan	RIS

(1)	(2)	(3)	(4)
BIDANG KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR			
1.	Laporan (LAP)	Laporan Hasil Analisis	LHA
		Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan	LHPBK
2.	Dokumen (DOK)	Kajian Penilaian Risiko	RISK
		Reviu	REV
		Uraian Penelitian	UP
BIDANG DATA DAN INFORMASI			
1.	Laporan (LAP)	Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Masuk dalam Daftar Sasaran Analisis Wajib Pajak (DSA) Berdasarkan Usulan Kanwil DJP	SAK
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Masuk dalam DSA <i>Joint Analysis</i> dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)	SAB
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Terkait dengan <i>Transfer Pricing (Country by Country Report (CbCR))</i>	SAC
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Masuk dalam DSA Berdasarkan Usulan Kanwil DJP dan Masuk dalam DSA <i>Joint Analysis</i> dengan DJBC atau DJA	SAKB
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Masuk dalam DSA dalam Wilayah Kanwil DJP dan Terkait dengan <i>Transfer Pricing (CbCR)</i>	SAKC
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Masuk dalam DSA <i>Joint Analysis</i> dengan DJBC atau DJA dan Terkait dengan <i>Transfer Pricing (CbCR)</i>	SABC
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Masuk dalam DSA Berdasarkan Usulan Kanwil DJP, Masuk dalam DSA <i>Joint Analysis</i> dengan DJBC atau DJA, dan Terkait dengan <i>Transfer Pricing (CbCR)</i>	SAKBC
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Diusulkan Berdasarkan DSA Usulan Internal Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	SAI

(1)	(2)	(3)	(4)
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Diusulkan oleh Direktorat Intelijen Perpajakan dalam Lembar Informasi Intelijen Perpajakan dan Termasuk dalam DSA Kanwil DJP	LIK
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Diusulkan oleh Direktorat Intelijen Perpajakan dalam Lembar Informasi Intelijen Perpajakan dan Termasuk dalam DSA <i>Joint Analysis</i> dengan DJBC atau DJA	LIB
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Diusulkan oleh Direkorat Intelijen Perpajakan dalam Lembar Informasi Intelijen Perpajakan dan Terkait dengan <i>Transfer Pricing</i> (CbCR)	LIC
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Diusulkan oleh Direkorat Intelijen Perpajakan dalam Lembar Informasi Intelijen Perpajakan, Termasuk dalam DSA Kanwil DJP, dan Termasuk dalam DSA <i>Joint Analysis</i> dengan DJBC atau DJA	LIK B
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Diusulkan oleh Direkorat Intelijen Perpajakan dalam Lembar Informasi Intelijen Perpajakan, Termasuk dalam DSA Kanwil DJP, dan Terkait dengan <i>Transfer Pricing</i> (CbCR)	LIK C
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Diusulkan oleh Direkorat Intelijen Perpajakan dalam Lembar Informasi Intelijen Perpajakan, Termasuk dalam DSA <i>Joint Analysis</i> dengan DJBC atau DJA, dan Terkait dengan <i>Transfer Pricing</i> (CbCR)	LIB C
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Diusulkan oleh Direkorat Intelijen Perpajakan dalam Lembar Informasi Intelijen Perpajakan, Termasuk dalam DSA Kanwil DJP, Termasuk dalam DSA <i>Joint Analysis</i> dengan DJBC atau DJA, dan Terkait dengan <i>Transfer Pricing</i> (CbCR)	LIK B C
		Laporan Hasil Analisis Wajib Pajak yang Dilakukan Berdasarkan Wajib Pajak yang Diusulkan oleh Direkorat Intelijen Perpajakan dalam Lembar Informasi	LII

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-22-

(1)	(2)	(3)	(4)
		Intelijen Perpajakan dan Termasuk dalam DSA dari Internal Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN PROSES BISNIS			
1.	Berita Acara (BA)	Berita Acara Migrasi Server	MIG
		Berita Acara Uji Petik Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	SAMP
		Berita Acara Perubahan Data Layanan Sistem	LSS
		Berita Acara <i>User Acceptance Test</i>	UAT
		Berita Acara Pengujian Sistem Perpajakan	UATI
		Berita Acara Pengujian Sistem Pendukung Perpajakan	UATE
2.	Surat Keterangan (KET)	Surat Keterangan Barang Milik Negara	BMN
3.	Laporan (LAP)	Laporan Studi Kelayakan <i>End User Computing</i> (EUC)	EUC
4.	Dokumen (DOK)	Dokumen Kajian terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi	DK
		Dokumen <i>Request for Change</i>	RFC
		Dokumen <i>User Requirement Specification</i>	URS
		Dokumen Rancangan Rinci Sistem Informasi	SRS
		Analisis Dokumen terkait Pengembangan Aplikasi	APK
		Kajian Pengembangan Peraturan dan/atau Kebijakan terkait Proses Bisnis	PROBIS
PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK			
1.	Surat Dinas (S)	Surat Klarifikasi dalam rangka Pengampunan Pajak	PPKLA
		Surat Pembetulan dalam rangka Pengampunan Pajak	PPPEMB
		Surat Peringatan dalam rangka Pengampunan Pajak	PPSP
2.	Lembar (LB)	Lembar Penelitian dalam rangka Pengampunan Pajak	PPPEN
		Lembar Pengawasan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak	PPLP
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA			
1.	Surat Dinas (S)	Surat Klarifikasi Pengungkapan Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS)	PSKLA
		Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih	PSTUL
		Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih	PSBAT
		Surat Teguran dalam rangka PPS	PSST

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-23-

(1)	(2)	(3)	(4)
		Surat Klarifikasi Pembatalan Kebijakan 1	KLAPPS1
		Surat Klarifikasi Pembatalan Kebijakan 2	KLAPPS2
		Pembatalan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Program Pengungkapan Sukarela 1	PPSBTL1
		Pembatalan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Program Pengungkapan Sukarela 2	PPSBTL2
2.	Surat Keterangan (KET)	Surat Keterangan Pengungkapan Harta Program Pengungkapan Sukarela 1	PPS1
		Surat Keterangan Pengungkapan Harta Program Pengungkapan Sukarela 2	PPS2
3.	Lembar (LB)	Lembar Penelitian dalam rangka PPS	PSPEN
		Lembar Pengawasan dalam rangka PPS	PSLP
4.	Dokumen (DOK)	Uraian Penelitian Pembatalan Kebijakan 1	PPSBTL1
		Uraian Penelitian Pembatalan Kebijakan 2	PPSBTL2
LAIN-LAIN			
1.	Surat Dinas (S)	Surat Izin Menempati Rumah Negara	IRN
2.	Berita Acara (BA)	Berita Acara Serah Terima Rumah Negara	STRN
		Berita Acara <i>Request</i> Pengembalian Dokumen	REQGSR
		Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN)	BMN
		Berita Acara Serah Terima BMN melalui E-Catalog	ECAT
3.	Surat Keterangan (KET)	Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan	RN
4.	Lembar (LB)	Lembar Pengesahan Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional	KT

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd.

PENI HIRJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM,



DWI BUDI ISWAHYU

NIP. 197011021990121001